

**KEBIJAKAN BBBP SEBAGAI PEMBANGUNAN HOLISTIK  
PEMERINTAHAN NARENDRA MODI DALAM MENGOPTIMALKAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2015-2017  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**PRIMADIANI DIFIDA WIDYAPUTRI**

20323166

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**KEBIJAKAN BBBP SEBAGAI PEMBANGUNAN HOLISTIK  
PEMERINTAHAN NARENDRA MODI DALAM MENGOPTIMALKAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2015-2017**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**PRIMADIANI DIFIDA WIDYAPUTRI**

20323166

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan BBBP Sebagai Pembangunan Holistik Pemerintah Narendra  
Modi Dalam Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan di India Tahun  
2015-2017**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
14 Mei 2024

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan-Penguji

Tanda Tangan

- 1 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

*[Signature]*  

---

*Karina*  

---

*[Signature]*  

---

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 30 April 2024*

A yellow rectangular stamp is positioned behind a handwritten signature in black ink. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top center. Below the emblem, the text 'MATERAI' is printed in red. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code 'BE7 CALX103098082' is visible. The signature is written in a cursive style over the stamp.

Primadiani Difida Widyaputri

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	i
	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEM</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	viii
<b>ABSTRAK</b>	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	10
<b>1.1 Latar Belakang</b>	10
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	19
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	20
<b>1.4 Cakupan Penelitian</b>	20
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	21
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	24
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	27
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	28
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	28
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	28
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	29
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	29
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	29
<b>BAB 2</b>	31
<b>2.1. Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao Dalam Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi</b>	31
<b>2.2 Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao Dalam Pemberdayaan Perempuan di Arena Publik dan Masyarakat</b>	41
<b>BAB 3</b>	47
<b>3.1 Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao Dalam Struktur Keluarga dan Posisi Perempuan Dalam Independensi Karier</b>	47

<b>3.2 Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao Pada Spektrum Psikologis/Ideologis Perempuan Dalam Budaya Masyarakat</b>	54
<b>BAB 4</b>	61
<b>4.1 Kesimpulan</b>	61
<b>4.2 Rekomendasi</b>	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	67

## DAFTAR SINGKATAN

BBBP	Beti Bachao Beti Padhao
BJP	Bharatiya Janata Party
CEDAW	Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women
NSSO	National Sample Survey Office
UN Women	The United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Kesetaraan Gender di India	11
Gambar 2. Perekonomian Terbesar di Dunia	24
Gambar 3. Laporan Daya Saing Global	29

## ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah upaya memberikan kekuatan, pilihan, dan kebebasan bagi perempuan dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Di level nasional, dalam memberdayakan perempuan diperlukan adanya partisipasi kolektif antara negara sebagai entitas politik tertinggi dan masyarakat sebagai pelaksana pemberdayaan perempuan. India sebagai negara berkembang di Asia Selatan menjadi negara yang sedang mengupayakan optimalisasi pemberdayaan perempuan melalui kebijakan pembangunan holistik multi sektor yang mampu memberikan dampak signifikan pada pembangunan negara. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi pada periode pertamanya, muncul kebijakan yang disebut dengan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) sebagai jembatan dalam mengaktualisasikan pemberdayaan perempuan di India. Upaya yang termaktub dalam kebijakan ini adalah pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan kemampuan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economically productive*), memberikan pengarahannya pada partisipasi perempuan di ranah publik, jaminan terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik, serta budaya pengarusutamaan perempuan dalam sektor-sektor lainnya. Melalui upaya yang dilakukan Narendra Modi, perempuan diberikan kekuatan dan jaminan dari negara untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi (*self-sufficiency*).

**Kata-kata kunci:** Pemberdayaan Perempuan, Narendra Modi, *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP)

## ABSTRACT

*Women empowerment is an attempt to provide power, choice and freedom for women to optimize their potential. At the national level, empowering women requires collective participation between the state as the highest political entity and society as the implementer of women empowerment. India, as a developing country in South Asia, is a country that is seeking to optimize women empowerment through holistic, multi-sector development policies that are capable of having a significant impact on the country's development. Under the leadership of Narendra Modi in his first term, a policy emerged called *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) as a bridge in actualizing women's empowerment in India. The efforts contained in this policy are economic development through empowering abilities to increase economic growth (*economically productive*), providing guidance on women's participation in the public sphere, guaranteeing women's representation in the world of politics, as well as a culture of mainstreaming women in other sectors. Through the strategies made by Narendra Modi, women are given strength and guarantees from the state to fulfill their personal needs (*self-sufficiency*).*

**Keywords:** *Women Empowerment, Narendra Modi, Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah isu transnasional yang saat ini menjadi poros perhatian dunia dengan segala dinamika dan pengaruhnya pada kebijakan. Menjadi penting untuk dibahas karena perempuan dan eksistensinya seringkali termarginalisasi dan mengalami opresi. Pada faktanya, masih banyak perempuan yang terjat dalam lingkungan yang patriarkis sehingga perempuan menjadi insan yang dinomorduakan di berbagai sektor (Mareta 2017, 3). Bukan hanya itu, permasalahan perempuan juga tidak terlepas dari peran pemangku kebijakan untuk mengambil langkah yang tepat untuk meresolusikan hal tersebut. Di kancah internasional, isu perempuan sudah masuk ke tahapan konstitusi dimana keterlibatan perempuan diratifikasi di berbagai macam *platform* baik organisasi internasional maupun rezim internasional (Mareta 2017, 4).

India sebagai negara berkembang di Asia juga mengalami hal serupa, dimana perempuan menjadi isu kontroversial untuk dibahas. Melihat banyaknya kasus yang terjadi di India seperti kekerasan dan penindasan terhadap perempuan, diskriminasi gender bagi perempuan yang dianggap lemah, serta beban ganda yang dialami oleh perempuan di India baik dalam lingkup domestik maupun sektor publik. Beberapa kasus yang disebutkan di atas menjadi fenomena yang tak terhindarkan di India karena perempuan masih

dianggap sebagai kelompok rentan yang layak mendapatkan diskriminasi (Mareta, 2017, 5). Tak jarang perempuan juga menjadi korban kekerasan berdasarkan gender. Terlihat pada gambar di bawah, Female Empowerment Index (Femdex) melakukan klasifikasi pada kesetaraan gender di dunia kerja dan kehidupan sosial, India merupakan negara dengan kekerasan terhadap perempuan sebesar 37% (McKinsey&Company 2015, 5) . Ditambah lagi, India tidak memiliki perlindungan hukum (*legal protection*) yang besar pada perempuan, seperti yang terlihat pada gambar jumlahnya hanya sebesar 0.399 saja, padahal adanya kekuatan perlindungan hukum dari pemerintah merupakan aspek yang mampu melindungi perempuan dari jeratan diskriminasi dan kekerasan pada perempuan. (McKinsey&Company 2015, 9).

	China	East and Southeast Asia (excluding China)	India	South Asia (excluding India)	Middle East and North Africa	Sub-Saharan Africa	Latin America	North America and Oceania	Eastern Europe and Central Asia	Western Europe
<b>Female population, 2014 (million)</b>	671	401	612	194	191	412	276	196	181	212
<b>Gender equality in work</b>										
Labour-force participation rate (F/M ratio)	0.817	0.707	0.338	0.508	0.324	0.839	0.672	0.823	0.777	0.792
Professional and technical jobs (F/M ratio)	1.072	1.003	no data	0.346	0.553	0.744	1.064	1.319	1.648	0.964
Perceived wage gap for similar work (F/M ratio)	0.570	0.647	0.483	0.506	0.604	0.629	0.463	0.608	0.586	0.527
Leadership positions (F/M ratio)	0.201	0.384	no data	0.076	0.116	0.339	0.573	0.736	0.582	0.503
Unpaid care work (M/F ratio)	0.389	0.299	0.102	0.176	0.161	0.476	0.350	0.618	0.506	0.482
<b>Gender equality in society</b>										
<b>Essential services and enablers of economic opportunity</b>										
Unmet need for family planning (% of women)	4%	13%	13%	17%	12%	24%	10%	7%	10%	9%
Maternal mortality per 100,000 births	32	103	190	164	57	483	70	25	21	6
Education level (F/M ratio)	0.973	0.962	0.763	0.788	0.883	0.689	0.989	1.000	0.978	0.997
Financial inclusion (F/M ratio)	0.873	0.845	0.659	0.525	0.638	0.740	0.799	0.865	0.881	0.827
Digital inclusion (F/M ratio)	no data	0.868	0.724	0.723	0.767	0.580	0.965	0.996	0.941	0.951
<b>Legal protection and political voice</b>										
Legal protection (index)	0.583	0.483	0.399	0.261	0.226	0.415	0.657	0.742	0.525	0.771
Political representation (F/M ratio)	0.191	0.156	0.114	0.152	0.116	0.310	0.302	0.346	0.169	0.486
<b>Physical security and autonomy</b>										
Sex ratio at birth (M/F ratio)	1.170	1.060	1.108	1.066	1.049	1.038	1.049	1.049	1.061	1.057
Child marriage (% of girls and young women)	2%	8%	27%	26%	12%	19%	3%	2%	3%	1%
Violence against women (% of women)	15%	25%	37%	44%	38%	40%	37%	33%	19%	22%

Gambar 1. Persentase Kesetaraan Gender di India

Sumber: *The Power of Parity: Advancing Women's Equality in India*

(2015)

Kemudian adanya pemahaman tentang warisan budaya patriarkis yang masih berkembang sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat India juga menjadi faktor utama perempuan tidak dianggap lebih penting dari laki-laki. Lebih lanjut, sedikitnya partisipasi perempuan di ranah pendidikan formal juga menjadikan perempuan tidak memiliki cakrawala intelektual yang luas atas hak-hak yang semestinya mereka miliki (Sharma and Manisha 2004, 118).

Diperkuat oleh bukti bahwa budaya patriarki yang terus menjalar dan mengempakkan sayap ideologinya ke seluruh penjuru India memperkeruh situasi dan kondisi perempuan di India (Himani 2016, 5). Ditambah dengan munculnya paradigma-paradigma yang muncul di masyarakat tentang perempuan yang mendapat stigmatisasi di lingkungan sekitarnya menjadikan perempuan seolah lemah tak berdaya. Secara tidak langsung perlakuan seperti ini yang mengecilkan ruang gerak perempuan di India, sehingga sulit bagi mereka untuk memerdekakan dirinya dari jeratan patriarki. Perempuan seolah dianggap sebagai makhluk dalam kandang yang berada di bawah kontrol laki-laki sebagai bentuk ketaatan. Kondisi ini menjurus pada ketidakadilan peran laki-laki dan perempuan di India. Ketidakadilan ini berimplikasi pada banyak sektor yang justru menjadi ancaman primordial yang nantinya membawa pengaruh pada sistem negara yang tidak proporsional. Perlu diketahui bahwa isu domestik seperti diskriminasi gender yang terjadi di India dapat dengan

mudah menghancurkan eksistensi India di kancah internasional. Sebab citra negara memiliki peran penting dalam tatanan internasional.

Adapun dalam menghadapi diskriminasi yang terjadi pada perempuan di India terdapat partisipasi dari pihak ketiga yang membawa pengaruh cukup besar pada dinamika permasalahan ini (Mareta 2017, 11). Pihak ketiga yang dimaksud diantaranya adalah *United Nation (UN) Women* sebagai organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewadahi aspirasi dan memantau arus pergerakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi isu-isu perempuan di India. Tuntutan ini berfokus pada poin-poin yang harus menjadi strategi bagi pemerintah India dalam menjalankan agenda politiknya. Poin-poin yang dimaksud adalah sebagai berikut,

“Perempuan memimpin, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat yang setara sistem pemerintahan, dan hidup bebas dari segala bentuk kekerasan berbasis gender; perempuan mempunyai jaminan atas pendapatan, pekerjaan yang layak, dan otonomi ekonomi, dan perempuan serta perempuan muda yang terpinggirkan mempunyai akses terhadap, berpartisipasi dalam dan mencapai pembelajaran, kewirausahaan dan pekerjaan yang berkualitas; dan semua perempuan serta anak perempuan memperoleh manfaat dari penerapan serangkaian norma, kebijakan dan standar yang komprehensif dan dinamis yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.” (UN Women 2015, 3).

Bukan hanya UN Women, tetapi juga terdapat juga ratifikasi pada rezim internasional yang dikenal sebagai *Convention on the Elimination of All Forms*

*of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang di dalamnya menjalankan peran sebagai mediator dalam mengeksekusi permasalahan diskriminasi perempuan di India. Kala itu, CEDAW dengan sangat progresif menakan India untuk menggaungkan nilai-nilai kemanusiaan pada perempuan dan mengadvokasikan perlindungan hukum yang adil (Hasibuan and Sabrina 2023, 109).

Pada dasarnya, kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai fasilitator ini tidak dapat berperan begitu signifikan, sebab poin utama untuk mereduksi fenomena diskriminasi gender untuk memberdayakan perempuan sepenuhnya berada pada pembuat kebijakan domestik yang dalam hal ini adalah pemerintah India. Metode yang dapat dilakukan oleh pihak ini hanya terbatas pada bentuk tuntutan dan kecaman yang nantinya menjadi pertimbangan pemerintah India dalam memutuskan kebijakan yang optimal.

Menilik lebih jauh fenomena diskriminasi gender yang terjadi di India juga tidak terlepas dari bagaimana sistem dan tata kelola negara turut memegang andil di dalamnya. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena diskriminasi yang dialami oleh perempuan India juga disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan sehingga relasi kuasa yang diterima perempuan mengalami ketimpangan. Pemerintah yang semestinya menyediakan fasilitas ruang aman dalam membentuk kebijakan yang universal tidak bisa menutup mata ketika diskriminasi dan opresi perempuan menyeruak (NDTV 2020).

Penting untuk melihat bahwa kebijakan ideal yang dibuat dengan melibatkan peran perempuan di dalamnya menjadi perpaduan yang

proporsional untuk menghentikan budaya diskriminasi gender ini. Terlebih ketika perempuan dalam budaya tradisional merupakan golongan yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi yang kerap kali terjadi menjadikan perempuan sebagai objek yang layak untuk mendapat hal serupa saat ini (Tedjo et al. 2021, 143).

Berkaitan dengan fenomena yang dialami oleh perempuan India, perdana menteri India yang saat ini dijabat oleh Narendra Modi melihat bahwa pemberdayaan perempuan memegang peran esensial untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sama halnya dengan pembangunan sebuah negara yang harus mempertimbangkan masyarakat sebagai poros perputaran dalam mengambil kebijakan (Khana 2017). Maka perempuan juga termasuk di dalamnya, dimana perempuan harus menjadi variabel dalam memutuskan kebijakan yang diterapkan di India. Selama dua periode masa jabatan yang diampu oleh Narendra Modi, penulis menilai bahwa kebijakan pembangunan holistik yang dicanangkan oleh Narendra Modi mengalami eskalasi yang masif ketika periode pertamanya terutama tahun 2015-2017 (France24 2019).

Dua tahun masa jabatan Narendra Modi di periode pertamanya sebagai perdana menteri telah menghadapi banyak tuntutan dan kecaman dari dunia internasional karena maraknya kasus diskriminasi gender yang dialami perempuan di India, maka dari itu muncul kebijakan sebagai bentuk solusi untuk menangani fenomena ini. Implikasi yang disampaikan dari lahirnya kebijakan holistik adalah sebuah bentuk upaya pemerintah India untuk mereduksi fenomena ketimpangan gender (Biswasa and Sinhab 2020, 51).

Pemerintah India melihat adanya integrasi dan tindakan universal dalam mengerahkan strategi terbaiknya melalui kebijakan dengan harapan semakin banyak masyarakat India yang mulai mencermati pentingnya perempuan dalam pembangunan di India .

Berdasarkan analisis lanjutan, India di bawah kepemimpinan Narendra Modi telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang dirasa mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan. Beberapa kinerja yang paling mutakhir yang dilakukan oleh Narendra Modi adalah memberlakukan program yang berbasis pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) perempuan (Biswasa and Sinhab 2020, 150). Narendra Modi melihat bahwa semakin banyak perempuan yang berdaya maka secara signifikan mampu berpengaruh pada tata kelola negara yang dinamis (Biswasa and Sinhab 2020, 8).

Hal ini juga diperkuat oleh Pam Rajput selaku akademisi gender dan aktivis berpengaruh di India menyatakan bahwa perempuan memang memerlukan adanya pemberdayaan untuk memereddakan diri mereka sendiri (Ray 2015).

*“India is at its worst on gender inequality. We have only three percent of women vice-chancellors of the 600-odd universities. So how is education really empowering women? We need women to be educated and skilled especially of higher order skill sets.”* Pernyataan Rajput dalam wawancaranya bersama Times of India pada tahun 2015 lalu (Ray 2015).

Konsep pemberdayaan perempuan ini kemudian dirumuskan bentuk proses pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan antara dampak yang

dihasilkan dari sebuah kebijakan dan implikasinya pada kurun waktu tertentu. Proses yang dimaksud disini adalah sebuah fase dimana terdapat pendekatan multidimensional yang dilakukan pemerintah untuk menganalisis lebih jauh tentang suatu isu tertentu dengan skema berbasis pada cakrawala intelektual dan pendekatan kemasyarakatan (Sharma and Manisha 2004, 120).

Dengan mempertimbangkan prinsip holistik yang dimaksud di uraian sebelumnya, maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah India sebagai solusi dalam menanggulangi permasalahan perempuan harus memegang teguh prinsip menyeluruh atau holistik. Di tahun 2015, pemerintah India akhirnya mengeluarkan skema kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP). Merefleksikan dari kebutuhan perempuan akan keholistikan dari seperangkat keputusan politik, kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) merupakan kebijakan yang mengadaptasi pola multi sektoral (Saini 2018, 227).

Kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) muncul sebagai jawaban yang diberikan pemerintah untuk perencanaan jangka panjang pada reduksi Child Sex Ratio (CSR) dan isu yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di bawah tiga kementerian yang bertanggung jawab yakni Pembangunan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan & Kesejahteraan Keluarga, dan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Saini 2018, 229). Dalam proses pemutakhiran kebijakan ini, pemerintah melihat perempuan harus mendapat kesempatan dan hak yang sama di seluruh penjuru India. Terdapat gambaran jangka panjang dimana kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao*

(BBBP) mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan meskipun hal ini adalah proses kompleks (Parmar and Sharma 2020, 1243).

Inisiatif kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) merefleksikan secara komprehensif pada permasalahan disparitas gender yang jika tidak ditanggulangi mampu berdampak negatif terutama di ranah sosial dan ekonomi (G. Kumar 2023, 20). Dalam proses riset panjangnya, kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) mengusung konsep interkoneksi antara kampanye kesadaran (*awareness campaign*), perubahan dinamika legislatif, dan sistem pendukung yang melibatkan seluruh warga negara India. Peluncuran kebijakan ini juga merupakan komitmen penuh pemerintah untuk mengatasi permasalahan berbasis gender dan berfokus pada metode pemberdayaan (G. Kumar 2023, 20).

Di bawah kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) yang telah diluncurkan pada 21 Januari 2015, Narendra Modi memastikan upaya pada perempuan India yang sehat jasmani dan rohani, mendapat pendidikan tinggi, dan kesempatan yang terbuka pada segala aspek (Reeta, Gupta and Verma 2021, 181). Bersamaan dengan upaya tersebut, Narendra Modi mengharapkan hasil optimal pada penghilangan diskriminasi berbasis gender, dan perlindungan pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup perempuan di India (Sharma and Borgohain 2022, 5144).

Perdana Menteri India, Narendra Modi dengan sangat mendalam menggunakan kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) untuk mengatasi permasalahan perempuan demi terwujudnya pembangunan negara. Bahkan dalam pidatonya, Narendra Modi melakukan sanjungan kepada seluruh

perempuan sebagai bentuk apresiasi pada perempuan sebagai martabat peradaban bangsa (Gange 2015).

"O Sisters, mothers, daughters - you are the ornaments of the world, you are the life of nations, the dignity of civilizations." Narendra Modi dalam pidato peluncuran kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) tahun 2015 (Gange 2015).

Menganalisis lebih jauh tentang pembangunan holistik, diperkuat oleh artikel "*Holistic Development Not Possible Without Gender Justice: PM Modi*" (2020) menyatakan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi melihat bahwa kesetaraan dan keadilan gender menjadi pionir perubahan yang dalam hal ini menjadi aspek pendukung pembangunan negara. Maka dari itu, tanpa adanya keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan pembangunan suatu negara akan terhambat. Kendati demikian, berdasarkan penjabaran di atas tentang lika-liku pemberdayaan perempuan di India dan munculnya kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) sebagai skema pembangunan holistik, penulis dapat menilik lebih jauh implementasi kebijakan tersebut dalam mengaktualisasikan pemberdayaan perempuan di India.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) sebagai pembangunan holistik pemerintahan Narendra Modi dalam mengoptimalkan pemberdayaan perempuan di India tahun 2015-2017?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menilik problematika pemberdayaan perempuan dan kebijakan pemerintah India dalam menangani hal tersebut.
2. Mengidentifikasi kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) sebagai skema pembangunan holistik Narendra Modi dan dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan di India.
3. Menganalisis implementasi kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) dalam pembangunan holistik Narendra Modi terhadap pemberdayaan perempuan di India.

### **1.4 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini berisi dinamika perempuan di India yang mengalami diskriminasi dan penghilangan haknya di ranah publik, serta proses pembentukan kebijakan pemerintah India pada periode Narendra Modi dalam memberdayakan peran perempuan melalui kebijakan holistik. Kebijakan holistik menarik untuk dibahas dalam penelitian ini karena di dalamnya mencakup bagaimana perempuan dioptimalisasikan. Bukan hanya itu, rentang waktu yang digunakan untuk menganalisis kebijakan holistik di era Narendra Modi terhitung sejak 2015-2017 merupakan opsi yang tepat karena termasuk ke dalam periode pertama masa jabatan Narendra Modi. Ditambah lagi, di tahun yang sama banyak tuntutan dari UN Women dan CEDAW tentang pemberdayaan perempuan yang dapat menjadi faktor pendorong lahirnya

kebijakan tersebut. Bukan hanya itu, pada tahun 2015-2017, India mengalami peningkatan yang signifikan pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Seperti yang tercatat dalam catatan kejahatan terhadap perempuan tahun 2015-2017 naik sebanyak 3.7% yang pada awalnya 54.23% menjadi 57.93% (Rathore 2023).

Pada tahun 2015 juga menjadi tahun yang mencatat dua dekade ratifikasi CEDAW oleh pemerintah India, sehingga terdapat peninjauan ulang pada laporan komitmen India terhadap CEDAW dan UN Women sebagai birokrasi yang mampu mendorong aksi konkret dari pemerintah India dalam memberdayakan perempuan (Mareta 2017, 8). Rentang waktu penelitian yang berakhir pada 2017 dipengaruhi oleh munculnya upaya pemerintah dalam peningkatan sumberdaya perempuan melalui kebijakan ekonomi yang mengalami eskalasi pada dua tahun pertamanya memimpin India (Economic Times 2020). Kebijakan ekonomi ini diklaim sebagai sebuah bentuk upaya menyejahterakan warga negara India melalui sektor ekonomi, sehingga dua tahun rentang yang dipilih akan menjustifikasi perihal kebijakan holistik Narendra Modi berhasil diterapkan atau justru membawa India pada kegagalan.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Sebuah buku yang berjudul “Women Empowerment and Development: Issues and Challenges” yang merupakan sebuah karya dari Sengupta, Bhattacharya, dan Arora (2019) menjelaskan bagaimana peran perempuan yang signifikan dalam pembangunan di India mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan

kesejahteraan. Diperjelas dalam sub bab “Welfare & Empowerment of Women: Steps by NDA-II Government of India” bahwa India telah mengupayakan berbagai macam cara untuk memberdayakan perempuan bahkan hingga pembuatan kebijakan. Kesejahteraan perempuan dianggap sebagai nilai vital di India terutama dalam partisipasi ekonomi dan kontribusi dalam ranah publik lainnya.

Lebih lanjut, dalam tulisan ini juga mencakup gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam melihat isu perempuan sebagai poin krusial yang dibawa dalam kampanye pemilihan umum hingga pada tahapan menjabat sebagai perdana menteri dalam melaksanakan tatanan pemerintahan yang berfokus pada peran dan pemberdayaan perempuan di ranah teori maupun praktis (*women-centric*). Tulisan ini mampu dapat digunakan sebagai acuan utama dalam menjabarkan perempuan yang berimplikasi pada pembangunan sebuah negara yang nantinya akan dikaitkan dengan kebijakan holistik.

Selanjutnya terdapat tulisan berjudul “Narendra Modi and The New Education Policy: Retrospection, Reform and Reality” karya Sharma (2016) menjadi pemantik dalam menuliskan tentang latar belakang kebijakan pendidikan yang dibuat oleh Narendra Modi sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan. Di dalamnya membahas dinamika *New Education Policy* (NEP) dan inisiatif Modi lainnya dalam konteks pembangunan di India. Penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut sebab terdapat korelasi yang bertaut antara kebijakan pengarusutamaan pemberdayaan perempuan yang dibuat oleh Narendra Modi dengan skema politik yang menjadi gaya

kepemimpinannya saat ini, sehingga tulisan ini mampu mendorong pengetahuan baru soal kebijakan holistik yang diterapkan di India pada masa kepemimpinan Narendra Modi.

Tulisan ini juga menjadi standarisasi yang mampu mendeterminasikan apakah ketidakberdayaan perempuan di India yang masih kerap terjadi dipengaruhi oleh kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, sebab restrukturisasi dalam kepemimpinan menciptakan transisi baru dalam kebijakan. Maka dari itu, tulisan ini mencakup kebijakan edukasi sebagai latar belakang era kemajuan di India saat ini.

Dalam perspektif lain berjudul “(Un)Modifying India: Nationalism, Sexual Violence and The Politics of Hindutva” karya Varma (2017) yang membahas soal konsep pascakolonialisme India yang mengadaptasi nilai-nilai kekerasan seksual dalam tatanan pemerintahannya yang maskulin kala itu, sehingga kebangkitan dari supremasi Hindu dalam politik menjadi resolusi yang hadir untuk menghapuskan tatanan tradisi kekerasan seksual dalam supremasi hukumnya dengan tujuan peninjauan ulang pada tata kelola politik di Era Narendra Modi. Tulisan ini juga membahas sejarah awal pascakolonial di India yang melihat kekerasan seksual sebagai dinamika negara dalam meredam konflik, sehingga tulisan ini membantu melihat bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan telah mengakar dan menjadi tradisi di India.

Bukan hanya itu, dinamika kepemimpinan Modi juga menjadi penting sebagai acuan dalam melihat budaya ini masih terus bereksistensi dan menebarkan kepakannya di ranah politik atau justru dibumihanguskan

oleh Narendra Modi. Bukan hanya itu, tulisan ini juga menjabarkan fakta-fakta ironi tentang Narendra Modi yang selama masa pemerintahannya juga kerap kali meninggalkan esensi pentingnya kesejahteraan pada perempuan. Maka dari itu penggunaan tulisan ini bertujuan untuk memantau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di era kepemimpinan Narendra Modi serta inisiatif lain yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosio-politik India pascakolonial.

Adapun dari ketiga bahan bacaan di atas terdapat perbedaan signifikan yang membedakan penulisan penelitian ini dengan referensi yang ada. Pada bahan bacaan pertama terdapat pembahasan mengenai dinamika pembangunan negara dan partisipasi perempuan di dalamnya, tetapi tidak membahas secara rinci soal pembangunan yang bersifat holistik. Sedangkan untuk bahan bacaan kedua berisi latar belakang pendidikan yang mendorong Narendra Modi untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, namun di dalamnya tidak mencakup periode kepemimpinan Narendra Modi. Terakhir bahan bacaan ketiga yang membahas soal latar belakang budaya yang dapat menjadi fakta pendukung pada kebijakan yang diambil oleh Narendra Modi saat ini.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisis konsep pemberdayaan perempuan dan implikasinya pada pembangunan suatu negara, penulis menggunakan teori independensi dan pemberdayaan perempuan yang dicetuskan oleh Hemalata Dandekar pada tahun 1986. Melalui karyanya yang berjudul “Indian Women’s

Development: Four Lenses” (Dandekar 1986) menuliskan bahwa terdapat empat poin penting dalam melihat pemberdayaan perempuan di India. Adapun empat poin yang dimaksud adalah basis ekonomi perempuan, arena publik dan masyarakat, struktur keluarga dan posisi perempuan dalam profesi politik, dan psikologis/ideologis tentang perempuan dalam budaya masyarakat.

Dalam tulisan (Dandekar 1986, 25) terdapat integrasi dari tiap-tiap variabel yang menghubungkan pemberdayaan (*empowerment*) dengan basis ekonomi perempuan, arena publik dan masyarakat, struktur keluarga independensi karier perempuan, dan psikologis/ideologis tentang perempuan dalam budaya masyarakat.

Munculnya indikator yang diklaim oleh Dandekar sebagai tolok ukur pemberdayaan perempuan di India disebabkan oleh spektrum heterogen yang melihat perempuan memiliki perbedaan kebutuhan, kendala, tantangan, dan aspirasi sehingga empat indikator di atas mampu mengukur sejauh mana upaya pemerintah memmanifestasikan pemberdayaan perempuan di India.

Poin utama yang juga merupakan titik puncak pemberdayaan perempuan dilihat melalui aspek ekonomi, dimana pembagian peran yang ideal dalam bekerja juga menjadi indikator yang mampu melihat relasi ketergantungan atau interdependensi antara perempuan dan laki-laki di India (Dandekar 1986, 26). Keterlibatan ekonomi dan produktivitas di India juga berpengaruh soal cara pandang sosial yang mana terdapat labelisasi status sosial ketika perempuan terjun ke ranah publik untuk bekerja di lapangan, maka dari

itu pengukuran aspek ekonomi dilihat dari adanya kesetaraan dalam distribusi ekonomi bagi laki-laki maupun perempuan.

Sementara arena publik dan masyarakat ditafsirkan oleh (Dandekar 1986, 26) sebagai partisipasi publik juga memiliki beberapa indikator yang menunjukkan bahwa perempuan berhak atas penguasaan sumber daya, pengakuan atas hasil produksi, keterbukaan penyampaian aspirasi, pertimbangan perempuan dalam kebijakan, keterwakilan kepentingan perempuan dalam kelompok sosial untuk meningkatkan status perempuan di masyarakat. Dalam teorinya, Hemalata Dandekar juga menyampaikan hubungan egalitarian antara laki-laki dan perempuan dapat mendeterminasikan pembagian peran yang ideal bagi laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik, maupun ranah domestik. Hal ini disebabkan keterlibatan laki-laki dalam ranah domestik juga memiliki substansi yang sama pentingnya dengan partisipasi perempuan di ranah publik.

Disampaikan oleh (Dandekar 1986, 26) bagaimana spektrum struktur keluarga independensi karier perempuan melihat perempuan yang hidup dalam tertutupnya akses ekonomi, budaya patriarki, dan struktur keluarga yang tidak mengedepankan peran perempuan tidak memiliki pola pengaruh yang besar di karier. Spektrum ini banyak dipengaruhi oleh tradisi liberal dimana perempuan sudah semestinya diberikan hak dan kesempatan atas partisipasi politik, pendidikan tinggi, dan pekerjaan profesional.

Poin esensial terakhir yang adalah persoalan psikologis/ideologis tentang perempuan dalam budaya yang dimaksud dalam lensa (Dandekar 1986,

26) adalah bagaimana nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di India adalah budaya patriarki yang melihat perempuan tidak lebih penting dari laki-laki, sehingga terdapat dominasi maskulin di India dimana laki-laki seolah memegang kekuasaan paling tinggi. Segala bentuk stigmatisasi pada perspektif perempuan dan laki-laki yang patriarki ini kemudian menjadi budaya yang diakulturasikan dalam tatanan sistem yang patriarkal. Maka budaya yang memberdayakan perempuan juga merupakan uraian panjang yang berdampak pada keberhasilan pemberdayaan perempuan di India.

Empat lensa Hemalata Dandekar pada akhirnya memutakhirkan empat poin yang saling menyempurnakan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan di suatu negara dikatakan berdaya apabila telah memenuhi empat poin esensial di atas (Dandekar 1986, 29).

### **1.7 Argumen Sementara**

Dengan menggunakan empat indikator yang digagas oleh Dandekar dalam “Indian Women’s Development: Four Lenses” (1986) pemberdayaan perempuan harus memenuhi empat aspek yang saling terkoneksi untuk mewujudkan pemberdayaan yang optimal, sehingga pengukuran pada kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) yang ditengari oleh Narendra Modi harus mencakup empat poin Dandekar, yakni ekonomi perempuan, arena publik dan masyarakat, struktur keluarga dan posisi perempuan dalam profesi politik, dan psikologis/ideologis tentang perempuan dalam budaya masyarakat.

Apabila empat poin ini tercakup dalam indikator kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) Narendra Modi, tata kelola pemerintahan juga belum

dikatakan sempurna, sebab empat poin yang disampaikan oleh Narendra Modi harus saling memberikan dampak dan pengaruh yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh signifikansi dari tiap-tiap poin mengacu pada implementasi yang berbeda-beda, sehingga perlu pengukuran pasti untuk melihat efektivitas dari kebijakan holistik yang dicanangkan oleh Narendra Modi dengan mengarusutamakan peran perempuan di dalamnya.

Selama kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) berjalan pada tahun 2015-2017 masih banyak perempuan di wilayah plural yang belum mendapatkan pemerataan kebermanfaatannya kebijakan ini. Minimnya akses dan pengaruh patriarki yang sangat kental menghambat kinerja kebijakan di wilayah-wilayah terpencil. Ditambah karakteristik *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) yang sistematis membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memaksimalkan luarannya dalam memberdayakan perempuan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Metode yang digunakan penulis bersifat kualitatif dimana pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan berbasis pada bahan bacaan yang bersumber dari artikel jurnal, buku, website, dan literatur lainnya dengan kata kunci yang signifikan yakni India, pemberdayaan perempuan, dan Narendra Modi.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah Narendra Modi dalam kepemimpinannya. Sedangkan objek penelitiannya adalah perempuan di India yang menjadi landasan dalam melihat implementasi kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao*.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data diambil dari bahan bacaan seperti buku, artikel jurnal serta laporan organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah tingkat global untuk menganalisis lebih lanjut dinamika eksistensi India dalam konteks pemberdayaan perempuan.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian terdiri dari beberapa tahapan seperti pembuatan kerangka bahasan, pengumpulan data melalui bahan bacaan, pembuatan latar belakang, penyusunan perumusan masalah, membuat tujuan penelitian, pengkajian teori, kemudian merancang hasil penelitian dan menganalisis hasil penelitian diperkuat oleh kerangka pemikiran.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Pada bab pertama membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, hingga metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, proses penelitian dan ditutup dengan sistematika penelitian yang berisi rangkaian isi dari penelitian

Bab kedua menelaah tentang dinamika ekonomi dan politik di India dan relevansinya terhadap optimalisasi pemberdayaan perempuan yang dilihat dari dua sektor tersebut. Terdapat sub bab yang melampirkan sejarah singkat tentang

problematika perempuan di India dalam integrasi ekonomi dan mobilitas politik selama beberapa dekade terakhir.

Bab ketiga menganalisis implementasi kebijakan pembangunan holistik Narendra Modi dalam pemberdayaan perempuan yang ditinjau dari segi budaya dan sosial.

Pada bab keempat yang merupakan bab terakhir dalam tulisan berisi kesimpulan dan rekomendasi penulis dari penelitian yang telah diselesaikan.

## **BAB 2**

# **KEBIJAKAN BBBP SEBAGAI PEMBANGUNAN HOLISTIK PEMERINTAH NARENDRA MODI DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DI SEKTOR EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **2.1. Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao Dalam Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi**

Selama beberapa dekade terakhir, dinamika relevansi ekonomi dan sumber daya manusia di India memiliki peran krusial terhadap optimalisasi pemberdayaan perempuan. Sebagai negara peringkat kedua dalam jumlah populasi dunia, India cenderung abai pada tata kelola sumber daya manusia, terutama ketika membahas soal eksistensi perempuan. Hal-hal seperti kesetaraan gender, diskriminasi, subordinasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban kapitalis masih terus dialami oleh perempuan India dewasa ini. Padahal tahun 2022 lalu menjadi tahun yang mencatat populasi perempuan di India yang meningkat, dimana persentase penduduk perempuan sebesar 48,41% dan laki-laki sebesar 51.59% (Ellis 2021).

Perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan merujuk pada catatan kependudukan menyatakan hasil yang tidak terlalu signifikan, dimana perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari fakta ini, pemerintah harus mengambil kebijakan inisiatif sebagai langkah konkrit sebagai tindak lanjut keterbukaan partisipasi perempuan di ranah umum supaya dapat memaksimalkan potensi ekonomi. Sebab ketika disparitas ekonomi antara laki-

laki dan perempuan tidak segera dibenahi, maka negara akan mengalami degradasi yang signifikan dalam berbagai macam sektor lanjutan. Maka dari itu, India perlu mulai melakukan berbagai macam upaya untuk menjustifikasi bahwa pemberdayaan perempuan memegang andil besar dalam pertumbuhan ekonomi (Mudoj 2020, 214).

Tahun 2014 menjadi tahun yang menyaksikan kesuksesan Narendra Modi yang diangkat menjadi Perdana Menteri India yang diusung dari partai Bharatiya Janata Party (BJP). Narendra Modi berhasil menggantikan Manmohn Singh dalam kedudukan sebelumnya (Goyal 2022). Dalam peraihan jabatan Perdana Menteri, Narendra Modi memiliki perhatian khusus pada beberapa isu yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan bagi India kala itu. Penguatan janji politik pada eskalasi ekonomi, minimnya angka pengangguran, dan penguatan ekonomi melalui investasi menjadi isu yang digaungkan dalam menggambarkan agenda politiknya. Salah satu langkah konkret Modi dalam sektor ekonomi India dan merupakan kebijakan yang paling berdampak pada masa kepemimpinannya adalah integrasi yang dilakukan Modi dalam tindakan pengambilan kebijakan (*decision making*) yang menyeimbangkan skema kebijakan pusat dan kebijakan negara bagian.

Secara umum transisi masa kepemimpinan Narendra Modi ini memiliki aksentuasi pada reformasi ekonomi yang harus dipertahankan. Namun secara bersamaan segala bentuk kebijakan ekonomi yang dibentuk oleh Narendra Modi berjalan beriringan dengan adanya problematika struktural berupa

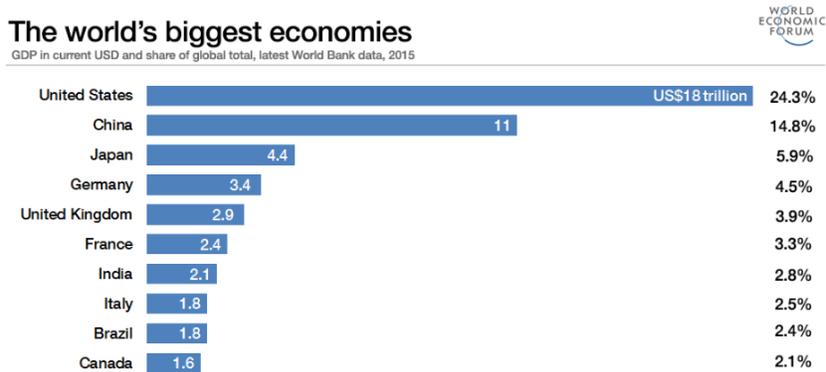
harapan masyarakat yang semakin tinggi atas kebijakan yang menyejahterakan masyarakat India.

Di bawah garis kekuasaannya yang menitikberatkan pada sektor ekonomi, Narendra Modi mempertegas bahwa kebijakan ekonomi domestik adalah prioritas dalam mewujudkan agenda politiknya. Terdapat lima kebijakan ekonomi yang telah dijalankan oleh Narendra Modi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di India yakni, “Make in India” yang merupakan sebuah kebijakan yang berasaskan pada keterbukaan akses seluas-luasnya di bidang industri maupun infrastruktur yang didukung oleh Kementerian Perdagangan dan Industri di India (Misra and Ghadai 2015, 97), digitalisasi India yang merupakan sebuah gagasan baru yang memanfaatkan kekuasaan internet dalam berbisnis dan melakukan aktivitas ekonomi lainnya (Bharti 2019, 2867), startup India berupa minat kewirausahaan digital yang menjulang tinggi dimana daya beli yang semakin tinggi dan berpotensi pada ekosistem bisnis digital (Chandiok, Sunita, and Dwarka BCIPS 2016, 90).

Kemudian *National Skills Development Mission of India* merupakan kebijakan yang menitikberatkan pada sebuah pelatihan *skill* atau kemampuan melalui program pemberdayaan dan pembekalan materi dari penduduk India yang berusia di bawah 25 tahun, dan kebijakan terakhir yakni *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* (Skema Inklusi Keuangan) adalah rancangan kebijakan ekonomi oleh Narendra Modi yang berfokus pada inklusivitas sektor finansial modern berupa kepemilikan atas rekening bank dan alur jaminan sosial berupa

skema asuransi dan dana pensiun bagi penduduk yang telah mengakhiri masa produktifnya (Dash and Dash 2020, 604).

Kelima kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan per kapita India dengan mode ekonomi yang bernuansa proteksionisme dan memanfaatkan digitalisasi yang memberlakukan keterbukaan ekonomi India terhadap negara lain. Ini berarti eksistensi Narendra Modi berhasil memajukan India dari sektor ekonomi dengan skala perhitungan GDP awal 15% menjadi 25% (Misra and Ghadai 2015, 97).



Gambar 2. Perekonomian Terbesar di Dunia

Sumber: (World Economic Forum, Trade and Investment 2017)

Seperti yang terlihat pada gambar 2. Perekonomian Terbesar di Dunia, India bahkan menjadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, bahkan diprediksi mampu meraih ranking kedua mengalahkan Amerika Serikat dan Indonesia (World Economic Forum 2017). Akan tetapi, diantara poin-poin kebijakan di atas, peningkatan ekonomi yang dicanangkan Narendra Modi hanya memiliki sebagian kecil dari keterkaitannya antara perempuan dalam pembangunan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

kebijakan di atas bukan merupakan kebijakan yang termasuk dalam kategori holistik. Melainkan sebuah gagasan kebijakan yang dinilai sebagai kebijakan pendukung dalam mewujudkan pembangunan holistik yang digadangkan oleh Narendra Modi dalam memberdayakan perempuan di India.

Ironinya, kebijakan yang termaktub dalam janji politik Narendra Modi juga tidak secara utuh menjabarkan peran penting perempuan yang juga mampu memberikan dampak berarti pada ekonomi di India. Jika mengacu pada penafsiran kata holistik dalam pembangunan maka rangkaian dalam mewujudkan kebijakan tersebut harus bersifat inklusif dan universal dengan mempertimbangkan peran perempuan dan bukan kebijakan yang dibuat hanya untuk tujuan teknokratis belaka (Mishra 2014, 400). Diperlukan adanya kebijakan retrospeksi yang pada akhirnya mampu mendukung perwujudan pembangunan holistik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk perempuan di dalamnya.

Untuk dapat menjustifikasi kebijakan ekonomi yang holistik maka dapat dinilai rihlah evidensi kebijakan yang dilakukan pemerintah India di era Narendra Modi. Di tahun 2015, muncul inisiatif kebijakan bernama *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) yang diratifikasi oleh jajaran kabinet Narendra Modi. Pada dasarnya kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) bertujuan untuk menghilangkan disparitas gender dalam skema pembangunan negara melalui skema dua arah. Skema dua arah yang dimaksud yakni skema pencegahan dan skema pemberdayaan untuk menghasilkan spektrum yang lebih mengutamakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Kumar 2023,

20). Fokus dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pendidikan bagi perempuan dan menyeimbangkan *sex ratio* antara laki-laki dan perempuan.

Pemerintah melihat bahwa pembangunan negara dimulai dari adanya pendidikan yang inklusif sehingga seluruh warga negara mendapat kesempatan yang sama dalam mengoptimalkan kemampuannya. Dengan begitu, target dari kebijakan akan lebih siap terjun langsung di dunia kerja dan menjadi aset negara (Mittal 2021, 9). Uraian ini sejalan dengan penjabaran di atas bahwa populasi perempuan di India yang hampir menyamakan jumlah populasi laki-laki merupakan faktor penting dalam mencapai target negara. Maka dari itu upaya memberdayakan perempuan akan lebih cepat jika diberikan kesempatan yang peluang yang besar dari pemerintah (Mittal 2021, 10). Akan tetapi, situasi dan kondisi disparitas gender masih sangat populer di India baik di ranah struktural.

Menanggapi kebutuhan tersebut di atas, dalam ranah kebijakan ekonomi hal disparitas gender mampu memberikan efek negatif pada neraca ekonomi (Kumar 2023, 20). Maka dari itu, kebijakan pemerintah mencoba untuk memvisualisasikan capaian keadilan bagi seluruh umat manusia dalam mengurangi segala bentuk penghilangan hal dan mereduksi ketimpangan yang dialami oleh warga negara India di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Untuk dapat melakukan adanya pembangunan yang holistik, Narendra Modi menjanjikan slogan politiknya yang inklusif dengan tiga segmentasi yakni, *acche din sabke liye* (hari baik untuk semua orang) *sabke sath, sabke pas* (dengan semua orang, dekat semua orang) (Himani 2016, 14).

Upaya pembangunan krusial yang diusung melalui kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) dalam sektor ekonomi adalah yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program keterlibatan komunitas dan kampanye kesadaran untuk memberdayakan perempuan melalui kebijakan peningkatan edukasi yang berfokus pada *skill-building* untuk menciptakan kesejahteraan yang mumpuni bagi perempuan di India (Dash and Dash 2020, 605). Melalui kebijakan ini kualitas sumber daya manusia (*human capital*) akan lebih mumpuni, sehingga perempuan tidak lagi memiliki dependensi pada hal-hal yang bersifat dinamis karena mereka mampu memberdayakan diri mereka sendiri. Bahkan dengan adanya kebijakan ini, perempuan akan dipantau dalam menjalankan kehidupannya sehari-sehari (*well-being*).

Sejak awal, pemerintah melihat kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) sebagai kebijakan yang holistik karena pengembangan kualitas sumber daya manusia yang digagas melalui kebijakan ini adalah kebijakan yang melihat sebuah proses sistematis. Dimana perempuan di India akan dibekali dengan kurikulum yang terkandung di dalam strategi kebijakan untuk memaksimalkan potensinya. Pembekalan ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan pendampingan oleh para ahli di bidangnya dalam mengatasi problematika yang menghambat perempuan India untuk tumbuh dan berkembang. Dari sini pemerintah menjamin seluruh perempuan di India untuk meraih kesempatannya secara maksimal dalam meraih potensinya sebagai tahap

awal untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Kumar 2023, 22).

Kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) juga memberikan kesempatan yang besar pada partisipasi perempuan di ranah sosial yang merupakan indikator dari terciptanya pemberdayaan perempuan. Dengan adanya kebijakan inklusivitas yang berfokus pada edukasi ini akan menghasilkan perempuan yang lebih berani dalam memaksimalkan potensi dalam menyampaikan gagasannya di ruang publik. Melalui kebijakan yang terkandung dalam *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) pula, perempuan akan lebih tangguh dalam menghadapi ketidakadilan struktural yang menimpanya, sebab mereka telah memahami hak-hak dan kedaulatan mereka sebagai perempuan di India (Kumar 2023, 21). Ditambah lagi dengan adanya kesadaran akan hak-hak yang dimiliki perempuan, mereka akan cenderung melakukan proses pengembangan diri (*self-development*) dalam meningkatkan kualitas taraf hidupnya. Hal ini akan berdampak positif pada tinggi daya saing global warga negara India yang berkontestasi di ranah internasional. Secara tidak langsung adanya peningkatan pada daya saing global ini mampu berjalan beriringan dengan kesejahteraan perempuan di India.

Melalui kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) yang dibuat pada tahun 2015 ini menjadi salah satu langkah mutakhir yang dibuat oleh pemerintah India di bawah masa kepemimpinan Narendra Modi (World Economic Forum, Trade and Investment 2017). Pasalnya sejak kebijakan ini diterapkan di India, eksistensinya memberikan sorotan yang menyiratkan

adanya kesuksesan dari berbagai macam bidang terutama pendidikan yang berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi di dalam sebuah negara. Seperti naiknya raihan jumlah pelajar perempuan di India yang dengan antusias mengikuti program yang dibuat di dalam kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) sehingga terdapat upaya untuk meningkatkan pola produktivitas pada sektor ekonomi.

Pemerintah India juga mempertimbangkan bahwa kebijakan juga menjadi pola reformasi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetisi global. Pertumbuhan ekonomi sejak 2014 telah mengalami kesuksesan yang membawa India berada pada ranking 39 setelah stagnan di posisi ke 48 (Schwab 2016, 18).

Economy	Rank 2016-2017	Rank 2015-2016	Change
India	39	55	16
Albania	80	93	13
Jamaica	75	86	11
Bhutan	97	105	8
Malta	40	48	8
Panama	42	50	8
Botswana	64	71	7
Georgia	59	66	7
Dominican Republic	92	98	6
Mexico	51	57	6

Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Report

Gambar 3. Laporan Daya Saing Global

Sumber: (World Economic Forum, India's growth is Outpacing China's. Here's How They Did It 2016)

India banyak melakukan peningkatan pada basis pendidikan yang berkontribusi besar yang menjadi persyaratan dasar bagi India untuk dapat terus memaksimalkan potensi warga negaranya (World Economic Forum, *India's growth is Outpacing China's. Here's How They Did It* 2016). Dalam hal ini, India juga perlu memberikan banyak kebijakan tambahan yang mampu memberikan inklusipada pekerjaan formal bagi perempuan hingga persentase berubah dari 24% ke 30% dengan menghilangkan segregasi pada jenis pekerjaan yang potensial untuk perempuan (Relations 2016)

Bersamaan dengan itu, perubahan pada cara pandang masyarakat India yang lebih terbuka pada isu-isu yang mengarusutamakan perempuan, sehingga kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan di sektor ekonomi mulai mengalami eskalasi (Pareek 2022, 352). Efek jangka panjang yang dihasilkan dari sorotan kesuksesan ini mampu mendatangkan keberagaman dan lingkungan yang inklusif di masyarakat di India sehingga tercipta lingkungan pembangunan yang holistik dan mendorong adanya kesetaraan gender. Inilah yang kemudian dimaksud oleh (Dandekar 1986, 26) tentang skema pemberdayaan perempuan yang melihat bahwa aspek ekonomi berkaitan erat dengan konsekuensi perempuan dalam perkembangan ekonomi mampu memberikan peningkatan bukan hanya pada ranah publik tetapi juga pada kenaikan status perempuan dalam ranah domestik.

## **2.2 Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao Dalam Pemberdayaan Perempuan di Arena Publik dan Masyarakat**

Dalam melihat sebuah proses pembangunan yang dicanangkan oleh negara, perlu adanya inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah atas kesejahteraan warga negaranya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya yang mencakup kepuasan terhadap kebijakan pemerintah (Mishra 2014, 398). Namun pembangunan yang dimaksud tidak hanya berbicara soal dinamika ekonomi saja, tetapi juga terhadap inklusivitas yang diberikan dari pemegang kekuasaan terhadap warga negaranya melalui bidang-bidang lainnya. Inklusivitas yang dimaksud adalah adanya aktualisasi peran penduduk yang tidak bias gender, sehingga partisipasi publik terwakilkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tidak dapat dipungkiri bahwa *status quo* perempuan masih harus mengalami lika-liku yang rumit, melihat stereotipe perempuan yang masih negatif membawa beban subordinasi yang tak kunjung mereda (Ajizah and Khomisah 2021, 60).

Istilah ranah publik merupakan sebuah hal yang akhir-akhir ini kerap dikaitkan dengan konteks perempuan. Bahkan (Dandekar 1986, 26) melihat ranah publik sebagai area perempuan menjalankan perannya sesuai dengan garis kehidupannya. Menilik kilas balik eksistensi perempuan yang lebih erat berada pada ruang domestik menjadikan konteks publik adalah sesuatu yang baru populer di abad ke-21. Secara umum, peran perempuan seringkali tidak dianggap penting dibanding peran laki-laki, sebab masyarakat banyak melihat peran perempuan lebih sedikit dibanding peran laki-laki. Maka dari itu,

keterwakilan perempuan di ranah publik jarang dijumpai di banyak negara di dunia, termasuk India. Hal ini terjadi karena adanya sistem patriarki yang dianut dalam setiap lini kehidupan masyarakat di India, sehingga terdapat resistensi bagi perempuan dalam berkecimpung di elemen publik (Cortis and Cassar 2005, 150). Padahal mobilisasi sosial yang ideal adalah kondisi lingkungan yang memiliki keseimbangan pada partisipasi sosial tanpa adanya perbedaan gender.

Diantara banyaknya permasalahan yang dialami perempuan dalam keterlibatannya di publik, dapat dianalisis lebih jauh bahwa terjadi problematika ini karena dinamika kebijakan yang seringkali abai pada peran perempuan. Dengan demikian labelisasi perempuan yang erat dengan ranah domestik dan rumah tangga membawa pengaruh yang besar pada jalinan partisipasi perempuan di publik (Parmar and Sharma 2020, 1243). Satu diantara banyak cara yang dapat mengatasi permasalahan kurangnya keikutsertaan perempuan di ranah publik adalah pemberian peran dan tanggung jawab sama bagi perempuan, sehingga terdapat tendensi dari perempuan untuk turut aktif dalam dinamika sosial (Mishra 2014, 403).

Dengan diberikannya tanggung jawab yang utuh bagi perempuan secara substansial mampu memberikan prinsip liberalisasi bagi perempuan untuk dapat menyertai dirinya dalam kelompok sosial (Parmar and Sharma 2020, 1243). Sangat disayangkan India masih menjadi negara yang mengalami kerumitan dalam memberikan ruang terbuka bagi perempuan untuk untuk mewujudkan emansipasi. Maka dari itu, perlu adanya penguatan positif sebagai

bentuk komitmen negara bagi perempuan yang bertujuan untuk memberikan ketertarikan pada perempuan agar terdorong untuk lebih aktif dalam berperilaku di lingkungan terbuka.

Sementara itu, India memiliki tugas besar untuk dapat memberantas budaya menomorduakan perempuan, sebab latar belakang negaranya yang secara historis merefleksikan pemberdayaan perempuan secara hierarki. Lantas menjadi penting bagi pemerintah India untuk melakukan proses perencanaan jangka panjang (*long term process*) yang secara komprehensif melibatkan perempuan dalam tatanan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Hemalata Dandekar melalui karyanya “Indian Women’s Development: Four Lenses” (Dandekar 1986, 26) bahwa terdapat hilirisasi yang terjadi antara variabel keikutsertaan perempuan di ranah publik dengan pengaruhnya pada sektor ekonomi maupun politik.

Jika dianalisis dari perspektif pembangunan, penekanan pada representasi perempuan dianggap sebagai sebuah upaya untuk memajukan negara dalam mewujudkan sistem negara yang demokratis. Pasalnya penekanan ini menjadi komitmen bagi negara dalam menjalankan perannya dalam mencapai target pembangunan bagi perempuan. India memiliki tiga prinsip yang ditekankan untuk bisa memaksimalkan potensi perempuan, yakni edukatif, integratif, dan memberdayakan (Mishra 2014, 404). Dari ketiga prinsip yang dimiliki pemerintah India untuk melanggengkan upaya keikutsertaan perempuan di ranah publik, maka kebijakan yang menjadi acuan

dalam memaksimalkan potensi tersebut adalah kebijakan yang dibuat oleh Narendra Modi pada tahun 2015, yakni *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP).

Pendekatan kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) dinilai kebijakan yang memiliki cakupan multi sektor yang berhasil memberikan dampak yang substansial pada kehidupan perempuan dalam basis kehidupan harian. Pemberian edukasi dan pembekalan yang diatur dalam kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) menjadi perempuan lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Secara berkala perempuan dengan basis pendidikan akan mempertahankan posisinya agar mampu menjadi pengambil keputusan, sehingga di masa yang akan datang pemerintah mampu menjamin bahwa perempuan juga memiliki daya juang dan kompetisi yang lebih baik demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Sharma and Borgohain 2022, 5144).

Sejak tahun 2015 dikeluarkan kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP), pemerintah India telah melakukan pemantauan dan supervisi yang berbasis pada ekspansi distrik di seluruh wilayah di India. Pada awal dikeluarkannya skema kebijakan ini distrik India hanya berjumlah 100 distrik, kemudian di tahun 2015-2017 mengalami eskalasi sebanyak 540 sehingga total menjadi 640 (Parmar and Sharma 2020, 1242). Terhitung tahun 2023, skema kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) sudah menjadi acuan di seluruh wilayah India. Hal ini memberikan dampak yang positif dalam menjamin perempuan dalam keikutsertaannya di ranah publik. Sebab perempuan mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka di ranah sosial ini merupakan

sebuah implementasi positif yang mendorong kualitas hidup mereka. Bukan hanya itu, tercakup dalam kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) bahwa pemerintah menjamin adanya perlindungan yang memastikan subjek hukum yang dalam hal ini perempuan mendapat hak sebagaimana mestinya secara administratif dan secara implementasi. Maka dari itu, secara sistematis pemerintah India dapat memaksimalkan potensi perempuan dalam memenuhi kebutuhannya secara pribadi (*self-sufficiency*) karena pemerintah telah melakukan langkah mutakhir yang diawali dengan lahirnya kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) (Sharma and Borgohain 2022, 5144).

Lebih lanjut, munculnya kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) menjadikan masyarakat mulai mengubah cara pandang mereka ke arah yang lebih sadar (*aware*) terhadap tingkah laku mereka di publik. Berkat kebijakan ini, mereka cenderung mulai memahami bagaimana peran perempuan bukan hanya sebagai beban sosial melainkan rekan setara yang mampu menciptakan dinamika sosial yang lebih dinamis (Sharma and Borgohain 2022, 5145), sehingga kampanye kebijakan ini sudah semestinya ditegaskan.

Dampak paling signifikan dari adanya perubahan pola pikir pada masyarakat mengenai keikutsertaan perempuan dalam ranah publik baik di lingkungan sosial maupun di ranah kerja dibuktikan oleh intensifikasi pada buruh dan tingginya angka pekerja di usia produktif (Motkuri and Naik 2016, 1). Tercatat dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh National Sample Survey Office (NSSO) di India di tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat peningkatan sebesar 1.8% partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja di India.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan angka partisipasi ini diambil pada tahun yang sama dengan kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) mulai diterapkan, sehingga ketika tahun 2015 hingga tahun 2017 angka partisipasi perempuan mengalami kestabilan.

Situasi ini memberikan keuntungan bagi perempuan untuk bisa terus memaksimalkan potensinya sebagai warga negara yang memiliki hak yang setara tanpa ada diversifikasi terhadap sektor-sektor tertentu termasuk keikutsertaannya di ranah publik. Dalam keberlangsungannya, kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) memberikan transisi pada dinamika pekerja perempuan yang berdampak pada pembangunan negara, sehingga kini kebijakan soal gender di ranah kerja menjadi fokus yang dikaji dalam perumusan kebijakan di dalam sidang pemerintah (Sarkar, Sahoo, and Klasen 2019, 292).

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan di ranah publik yang selama ini digadang-gadangkan oleh pemerintah mampu memberdayakan perempuan bukan hanya untuk kualitas hidup individunya saja, tetapi juga pada konteks yang lebih besar seperti pembangunan negara dan peningkatan mutu generasi yang akan datang. Sehingga perlu ada jaminan regulasi lanjutan yang mampu menaungi implikasi pemberdayaan perempuan dalam ranah publik ini. Mengingat India adalah negara dengan populasi yang cukup tinggi setiap tahunnya, maka terdapat perhatian penuh dari pemerintah untuk menjamin lapangan kerja yang memadai untuk warga negara yang membludak terutama pengarusutamaan pekerja perempuan di dalamnya..

## **BAB 3**

### **KEBIJAKAN BBBP SEBAGAI PEMBANGUNAN HOLISTIK PEMERINTAH NARENDRA MODI DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK DAN BUDAYA**

#### **3.1 Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao Dalam Struktur Keluarga dan Posisi Perempuan Dalam Independensi Karier**

Pemberdayaan perempuan yang ditinjau dari segi partisipasi politik salah satunya dapat diukur dari jumlah representasi perempuan di dalam elemen politik. Dalam beberapa waktu terakhir, populasi perempuan menempati posisi sebanyak 48%, ini berarti perbedaan antara jumlah populasi laki-laki dan perempuan di India tidak memiliki jarak yang terlalu jauh (Sharma 2020, 607). Akan tetapi, berbicara mengenai jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik memiliki disparitas yang cukup signifikan. India masih cenderung mengglorifikasi jabatan publik terhadap laki-laki, sehingga jumlah yang dimiliki oleh perempuan lebih sedikit. Kendati demikian, pemerintah India memberlakukan sistem kuota sebagai upaya afirmatif yang mampu memberikan ruang bagi perempuan dalam berkecimpung ke ranah politik (Kurniaty 2015, 188). Tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai kesetaraan gender.

Tidak terlepas pada sistem kuota, India sebagai negara demokratis juga memiliki beberapa lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjamin dan memastikan perempuan mampu masuk ke dalam parlemen

politik di India yang dikenal sebagai Komisi Pembatasan (*Delimitation Commission*). Komisi ini dibentuk untuk memastikan terdapat perempuan yang masuk untuk mewakili aspirasi dan kepentingan perempuan dalam perumusan kebijakan negara. Sementara itu untuk tetap memenuhi jumlah yang hadir dalam parlemen, pemerintah memberikan distribusi sebesar 30% yang memungkinkan perempuan hadir mewakili suaranya di sektor politik sebagai tokoh pejabat publik.

Hiruk-pikuk politik India belum bisa dikatakan mengalami perkembangan apabila tidak memiliki variasi gender dalam ruang politik. Maka dari itu perlu adanya partisipasi perempuan yang mampu memberikan warna dalam dinamika parlemen di India. Titik balik kontestasi politik antara laki-laki dan perempuan dalam politik diwarnai oleh bergabungnya Indira Gandhi sebagai perdana menteri India ketiga yang merupakan perdana menteri perempuan pertama. Majunya Indira Gandhi menjadi langkah pengobaran semangat bagi perempuan India agar tergerak untuk terjun ke dunia politik (Sharma 2020, 608). Sejak saat itu, India mulai mengalami pertumbuhan dimana perempuan mulai terbuka pada kesempatannya untuk bergabung dalam elemen politik di India.

Untuk menjamin angka yang terus diwakilkan oleh perempuan dalam politik, pemerintah India sejak tahun 2015 di bawah inisiatif kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menggagas dan mengkampanyekan perlindungan yang rigid atas hak bagi perempuan yang melibatkan dirinya

dalam politik (Ministry of Women & Child Development 2023). Dengan fokus ini, pemerintah dapat memberikan atensinya pada pola kepemimpinan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi pada negara. Sebagai pendukung, pemerintah India juga menerapkan *affirmative action* yang merupakan sebuah skema penitikberatan peluang bagi perempuan dalam mewakilkan dirinya dalam institusi politik. Setidaknya penitikberatan perempuan dalam politik mampu meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik yang harapannya mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Dua target utama diberlakukannya *affirmative action* oleh pemerintah India adalah sebagai berikut, pertama sebagai target keberlanjutan dari adanya *affirmative action* adalah mereduksi pola pikir seksisme dan hanya terfokus pada satu gender utama tanpa memberi kesempatan pada gender yang lain (Kurniaty 2015, 190). Kemudian target kedua yakni penghapusan bias gender yang memungkinkan meningkatnya relasi kuasa yang mampu merendahkan martabat perempuan (Meenakshi and Bakshi 2022, 10138).

Dalam menunjang langkah *affirmative action*, pemerintah India di bawah kepemimpinan Narendra Modi pada periode pertamanya masih terus berpacu pada perjalanan negara menuju negara yang universal atau dalam kata lain negara yang holistik. Maka dari itu, segala aspek yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan di India menjadi target yang harus dicapai. Ditambah lagi di periode pertamanya Narendra Modi terhitung sejak tahun 2015, India merupakan negara dengan status di bawah pengawasan pihak

ketiga, sehingga perlu ada usaha lebih untuk dapat mewujudkan negara yang berkesetaraan.

Langkah mutakhir yang diambil pemerintah India dalam menyokong keterlibatan perempuan di ranah politik dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang linier dengan aspek pemberdayaan perempuan melalui ekonomi dan sosial, yakni kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP). Mengingat kebijakan ini adalah kebijakan holistik dimana semua aspek saling terkait dalam mengarusutamakan peran perempuan. Dalam konteks memberdayakan perempuan dalam politik, kebijakan ini melihat bahwa memberikan kuasa pada perempuan dan kesempatan untuk menduduki kursi pembuat kebijakan merupakan sebuah bentuk upaya menuju kesetaraan gender (Naik 2017, 729).

Kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) melihat adanya partisipasi perempuan di dalam dunia politik menjadi resolusi yang mampu mereduksi angka ketimpangan, karena perempuan dalam politik mampu mempengaruhi regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan terdapat variasi sudut pandang dari tiap-tiap keterwakilan politik dalam pertimbangan kebijakan yang akan dibuat di semua spektrum, sehingga sistem negara yang demokratis dapat dijalankan dengan ideal (Naik 2017, 730). Basis dasar pelibatan perempuan dalam politik merupakan sebuah gagasan yang secara alamiah menggambarkan potret negara yang demokratis, karena terdapat kesempatan yang dibuka oleh negara terhadap warga negaranya (Equbal 2019, 64).

Namun terdapat tantangan paling berat yang seringkali dialami perempuan apabila membahas hiruk-pikuk karirnya di ranah politik, salah

satunya adalah implementasi kepentingan yang dibawa ke dalam segmentasi politik. Seringkali hadirnya perempuan sebagai representasi politik yang diusung oleh suatu institusi di atasnya tidak serta merta memberikan kemudahan mencapai pemberdayaan. Justru kepentingan ini tidak sepenuhnya terwakilkan karena adanya dominasi politik yang masuk dan menimbulkan permasalahan yang menjadi hambatan bagi perempuan dalam menjalankan perannya dengan maksimal (Kurniaty 2015, 193). Representasi perempuan ini menjadi alat untuk pemenuhan ambisi politik melalui legitimasi kebijakan yang dibalut dalam kerangka holistik.

Perlu digarisbawahi bahwa adanya perempuan dalam politik memiliki tujuan pokok sebagai variasi suara yang nantinya akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan yang bersifat universal, namun isu-isu yang diangkat dalam rapat politik seringkali isu-isu primordial yang merupakan kepentingan dari institusi pengusung perempuan tersebut (Kurniaty 2015, 193). Maka dari itu, beberapa hal yang pada akhirnya perlu diperhatikan oleh pemerintah India di era Narendra Modi adalah menjamin kekuatan perempuan dalam politik merupakan subjek penting dalam mewujudkan luaran yang inklusif dan holistik dengan cara menekankan skema kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP).

India yang merupakan negara berkembang ini memformulasikan representasi perempuan di legislasi politik adalah sebagai alat untuk mencapai pemberdayaan (Chandra 2016). Maka bersamaan dengan penerapan skema yang termaktub dalam kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP), perlu ada proses tawar menawar (*bargaining*) yang mengutamakan perempuan memiliki

kekuatan untuk mempertahankan sarana dan sumber dayanya sebagai anggota legislatif (Meenakshi and Bakshi 2022, 10138).

Diskursus representasi perempuan dalam politik memiliki nilai substansial yang sama pentingnya dengan pemberdayaan perempuan yang dilihat dari sudut pandang pembangunan sosial ekonomi. Dimana keberhasilan pemberdayaan perempuan yang dapat terjadi dari perspektif sosial ekonomi tidak dapat mengalami keberlanjutan apabila tidak ada perempuan yang terjun ke dalam badan legislatif negara, karena perempuan memegang peranan sebagai penyeimbang keputusan-keputusan yang akan dibuat demi keberlangsungan hidup warga negara di India. Maka secara prinsip, negara perlu menjalankan intervensi untuk memastikan perempuan tergabung dalam jajaran politik dengan membawa isu spesifik yang mengacu pada kebutuhan-kebutuhan perempuan (Gautam and Sharma 2023, 192).

Itikad yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya mendapatkan kepercayaan perempuan untuk tergabung dalam dunia politik adalah membangun ekspektasi dengan memberikan jaminan perlindungan pada kebebasan berpendapat di ruang publik, prosedur resmi dan kontrak kerja yang manusiawi, dan pemastian pada luaran kebijakan yang bersifat universal (Dandekar 1986, 26). Artinya pemerintah menyediakan skema pemberdayaan yang bukan hanya meliputi ruang publik tetapi juga pada ruang domestik, karena perempuan seringkali diberatkan dengan tanggungan domestik yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam mengambil kesempatan. Hal

ini berimplikasi pada jumlah keterwakilan perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki.

Menilik jejak perempuan dalam politik dapat dilihat dari drastisnya angka perempuan yang layak memilih dan dipilih di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Memasuki periode pertamanya di tahun 2014 memberikan potret keberhasilan *affirmative action* dalam mengkuotakan perempuan dalam politik. Pemilu yang saat itu dilaksanakan pada tahun 2014, terdapat sebanyak 397 juta perempuan yang memiliki hak suara (Dhamija, Dhamija, and Kumar 2016, 5). Lebih lanjut, di tahun yang sama terdapat 668 perempuan yang turut berkontestasi dalam pesta demokrasi dan memegang sebesar 12% kekuatan politik (Dhamija, Dhamija, and Kumar 2016, 6).

Dari hasil rekap suara perempuan dalam pemilu 2014, dampak yang dihasilkan dari jumlah perempuan yang meningkat baru dapat dirasakan secara optimal setelah satu tahun masa jabatan yakni pada 2015 bahwa terdapat skema keseimbangan gender dalam proses demokrasi dimana terdapat tujuh menteri yang dipilih sebagai perwakilan kabinet. Ketujuh menteri ini adalah Sushma Swaraj sebagai Menteri Kabinet Luar Negeri, Smriti Zubin Irani sebagai Menteri Kabinet Industri, Dr. Najma A. Heptulla sebagai Menteri Kabinet Dalam Negeri, Maneka Sanjay Gandhi sebagai Menteri Kabinet Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Harsimrat Kaur Badal sebagai Menteri Kabinet Industri Pangan, Sushri Uma Bharati sebagai Menteri Kabinet Energi dan Sumber Daya Mineral, Nirmala Sitharaman sebagai Menteri Kabinet (Dhamija, Dhamija, and Kumar 2016, 7).

Dari ketujuh legislatif terpilih menjadi bukti bahwa perempuan mampu memberdayakan dirinya melalui berbagai macam sektor apabila terdapat kesempatan yang dibuka. Menjadikan perempuan sebagai pejabat publik mampu memberikan refleksi bagi masyarakat bahwa terdapat komitmen besar India di bawah kepemimpinan Narendra Modi terhadap pemberdayaan perempuan. Artinya secara keterwakilan perempuan dalam politik juga merupakan sebuah kewajiban untuk menyeimbangkan peran perempuan di ranah domestik dan di ranah publik yang dijamin formulasinya oleh negara.

Efek jangka panjang yang akan dihasilkan dari berhasilnya perempuan yang maju ke dunia politik dapat secara langsung mendorong ekonomi India. Pasalnya politik juga mengatur soal bagaimana kebijakan publik dibuat, kebijakan pasar modal, pemberdayaan sosial, dan budaya masyarakat sebagai tonggak peradaban.

### **3.2 Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao Pada Spektrum Psikologis/Ideologis Perempuan Dalam Budaya Masyarakat**

Dalam menganalisis konteks budaya di India, (Dandekar 1986, 25) menegaskan bahwa budaya India akan berkorelasi dengan sistem kehidupan masyarakat India yang masih kental dengan sistem patriarki. Patriarki ini dimaknai sebagai sebuah keyakinan atau tabiat yang menomorsatukan laki-laki dalam setiap lini masa kehidupan, sehingga terjadi dominasi berkepanjangan dari gaya hidup ini yang menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang inferior (Novela 2023, 818).

Menilik secara historikal India yang merupakan negara dengan catatan budaya patriarki yang kental bermula pada nilai-nilai patriarki yang tumbuh dan berkembang di lingkungan terkecil yakni keluarga (Dandekar 1986, 25). Dimana topik perempuan seringkali ditinggalkan karena dianggap tidak sepenting eksistensi laki-laki dan dinamika kehidupannya (Wahyudi 2018, 72). Sebuah ajaran kultural ini diterima oleh anak-anak di India yang kemudian menjadi panutan (*role model*) dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (Prasetyo and Asbari 2023, 217). Parahnya lagi penerimaan nilai-nilai patriarki ini dijadikan cara pandang (*mindset*) oleh masyarakat India. *Mindset* ini tentunya merupakan pengaruh yang diterima oleh masyarakat India karena telah diserap dari lingkungan mereka.

Di India, hasil konstruksi sosial tentang patriarki telah mengakar bukan hanya pada cara pandang masyarakat tetapi juga menyangkut kualitas hidup warga negaranya. Pemahaman masyarakat luas yang masih terpaku pada dominasi yang begitu kuat menjadikan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memberdayakan dirinya sendiri (Chandra 2016, 4). Kiprah perempuan seringkali diabaikan karena sejak awal prinsip patriarki melahirkan gagasan bahwa perempuan bukan prioritas yang harus diperhatikan. Ironisnya cara pandang seperti ini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga tetapi juga pada kancah politik dan pembangunan negara (Wahyudi 2018, 80).

Budaya patriarki yang terus tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu menjadi tantangan yang tak kunjung mereda bagi India. Budaya patriarki seringkali menjadi hambatan bagi pemerintah dalam

perencanaan pembangunan negara, terutama ketika membahas mengenai pembangunan yang berkelanjutan (Wahyudi 2018, 66). Sejarah peradaban manusia yang stagnan dan cenderung tradisional sejak awal sudah menjadi tantangan sejak berabad-abad lalu. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin modern dunia, maka terdapat transisi pada pola pikir dan tindakan yang diambil oleh negara dalam menyetarakan kedudukan negara seiring dengan globalisasi.

Implikasi jangka panjang yang dihasilkan dari budaya ini adalah lingkungan sosial yang mengamini nilai-nilai patriarki dalam kehidupan domestik maupun di ranah publik. Lebih parahnya nilai-nilai ini kemudian diterapkan dalam kehidupan tingkat lanjut yakni kebijakan yang tidak bersifat universal, penomorduaan perempuan dalam ranah publik serta stagnannya pembangunan negara (Wahyudi 2018, 64). Stimulasi nilai-nilai patriarki membawa dampak yang amat serius apabila tidak ditangani secara progresif, sebab sesuatu yang berkaitan dengan pola pikir akan sulit untuk dibenahi jika tidak terdapat gebrakan yang mampu menembus batas pikiran manusia tersebut.

Masyarakat penganut nilai-nilai patriarki cenderung memiliki pola pikir statis dan menutup akses terhadap dirinya untuk berkembang (Rawat 2014, 47). Hal ini disebabkan terdapat kepercayaan (*trust*) pada apa yang selama ini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kenyataannya pola pikir yang tidak berkembang ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap kualitas sumber daya manusia. Latar belakang ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pihak, baik pemerintah maupun warga negara. Bukan

tanpa alasan, kuatnya pola pikir masyarakat dan budaya yang terus menerus tumbuh ini menjadikan sulitnya mendapat perubahan

Untuk mengatasi budaya patriarki yang masif diperlukan pendekatan multidimensi sebagai metode untuk memfasilitasi pemahaman mendalam tentang pembangunan (Rawat 2014, 45). Berfokus pada nilai-nilai inklusif dan partisipasi publik yang besar akan berdampak pada pembangunan konstan suatu negara. Mengingat budaya patriarki adalah akar dari tidak tercapainya pemberdayaan perempuan secara optimal. Menjadi sia-sia apabila pemberdayaan perempuan yang dimaknai oleh Hemalata Dandekar pada tahun 1986 melalui karyanya yang berjudul “Indian Women’s Development: Four Lenses” (Dandekar 1986, 29) tidak dapat mencakup empat poin utamanya. Budaya dalam proses pemberdayaan perempuan menjadi sebuah capaian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, partisipasi publik dan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini disebabkan budaya adalah kepercayaan yang mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan (Spencer-Oatey 2012, 3). Maka dinamika budaya menjadi perhatian khusus pemerintah dalam upayanya memberdayakan perempuan.

Menilik riwayat Narendra Modi dalam kepemimpinan pertamanya telah melakukan upaya pengesahan kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP). Namun beberapa relevansi yang menjadi tantangan tersendiri adalah seberapa signifikan kebijakan ini mampu memberikan dampak perubahan budaya yang mengarusutamakan perempuan. Melalui problematika ini, Narendra Modi mampu menciptakan budaya yang mengedepankan harkat dan martabat

perempuan dengan menjamin hak-hak dasar dan kesempatan yang diatur dalam hak advokasi legal (Kumar 2023, 21). Selain itu, Narendra Modi juga meyakini bahwa pemberdayaan dibentuk dari tonggak kehidupan yang menyadari bahwa pada akhirnya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diferensiasi dari aspek-aspek tertentu termasuk gender (Rawat 2014, 45).

Melalui kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) dan pendekatannya yang bersifat multisektoral, Narendra Modi melakukannya dengan metode intervensi sebagai skema asesmen yang berdampak pada pengarusutamaan perempuan (Saini 2018, 228). Skema intervensi dilakukan dengan berkolaborasi bersama Departemen Administrasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk meningkatkan kesadaran pada kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) (Gupta, Nimesh and Lal Singal 2018, 871). Salah satunya adalah dengan membiasakan masyarakat melihat logo dan stempel kebijakan yang merupakan komitmen pemerintah untuk mengedepankan perempuan dalam pembangunan negara dan mempromosikan penerimaan masyarakat akan hadirnya perempuan di masyarakat (Gupta, Nimesh and Lal Singal 2018, 871)

Narendra Modi menganut prinsip *grassroot* yang memungkinkan terjadinya perubahan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*). Ditegaskan dalam laporan yang direkapitulasi oleh United Nations Development Programme bahwa negara berkembang cenderung lebih mudah terpengaruh oleh kebijakan yang dimulai berbasis pada pendekatan *grassroot* (Manor 2003,

12). Hal ini tentu berpengaruh pada dampak kebijakan yang dirasa dekat dengan masyarakat, serta memiliki hasil yang instan (Manor 2003, 23).

Jika budaya pengarusutamaan perempuan telah mengakar pada prinsip hidup baik domestik maupun umum, maka dapat dipastikan bahwa luaran dari budaya ini mampu menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkualitas di India. Pasalnya pertumbuhan dan perkembangan India akan dipengaruhi oleh empat poin utama yakni pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, partisipasi perempuan di ranah publik serta budaya non-patriarki yang melekat dalam pedoman hidup manusia (Dandekar 1986, 26).

Secara spesifik, budaya dalam skema pemberdayaan perempuan yang diamini oleh (Dandekar 1986, 27) merupakan poin yang berbanding lurus dengan faktor politik dan sosial. Hal ini disebabkan proses yang inheren melihat konsistensi pemerintah dalam menentukan arah gerak politik India yang memicu perkembangan kelompok publik terhadap determinasi perempuan di lingkungan sosial mereka.

Maka untuk mempromosikan budaya pengarusutamaan perempuan diperlukan langkah stabil (*steady-state path*) yang ditengarai oleh pemerintah Narendra Modi (Ghosh 2018, 84), Langkah stabil yang menjadi prinsip dalam menjalankan kebijakan ini adalah dengan melakukan metode pembiasaan dengan cara persuasi kepada khalayak publik melalui penyebaran informasi dan berkolaborasi dengan tokoh publik (*public figure*) untuk mengenalkan kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) secara luas (The Economic Times 2023). Sehingga kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) mampu menjadi

solusi dalam kondisi masifnya beban subordinatif yang masih terjadi di India dengan menyadarkan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah menyetarakan potensi yang dimiliki tiap-tiap manusia dalam membangun negara (Ghosh 2018, 84).

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada dasarnya pemberdayaan perempuan merupakan sebuah diskursus yang dalam dewasa ini menjadi perhatian dunia. Banyak negara di dunia yang berambisi dalam mengarusutamakan isu-isu perempuan dan pemberdayaan melalui program-program negara yang visioner. Bagi sebuah negara mengimplementasikan pemberdayaan perempuan bukan sebuah hal yang mudah, diperlukan sistematisa khusus yang mampu mencakup skema pemberdayaan yang dimulai dari tahap paling kecil ke tahapan paling mutakhir. Diperlukan partisipasi kolektif dalam menjalankan proses memberdayakan perempuan, mulai dari birokrasi negara hingga koherensi pemerintah dengan warga negaranya. Tahapan-tahapan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi tiap-tiap negara dalam mengaktualisasikan pemberdayaan perempuan. Pasalnya isu perempuan baru populer di abad ke-21, dimana awalnya perhatian negara hanya terpaku pada isu primordial dan militer saja, sehingga menjadi hal baru bagi masyarakat global termasuk entitas politik dalam memahami bahwa terdapat isu penting yang berkorelasi dengan eksistensi perempuan.

Membahas mengenai dinamika perempuan merupakan ranah domestik atau privat, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak luar termasuk pemerintah. Hingga pada akhirnya maraknya kasus yang terjadi pada perempuan yang menjadi korban dari berbagai macam masalah menyeruak dan

menarik perhatian entitas politik yang dalam hal ini adalah negara. Kasus yang terjadi seringkali melibatkan perempuan sebagai korban yang tak punya kuasa dalam mempertahankan eksistensinya di ranah domestik. Hal ini terjadi karena perempuan selalu dianggap lemah dan tak berdaya, sehingga dianggap layak menjadi korban. Permasalahan yang terjadi pada perempuan tentu saja menyudutkan posisi perempuan yang tidak punya perlindungan secara komprehensif dari negara.

Bukan hanya itu, permasalahan yang kerap kali dirasakan oleh perempuan berupa kekerasan, marjinalisasi, pelecehan, beban ganda (subordinasi), labelisasi negatif, dan yang paling parah adalah femisida atau pembunuhan pada perempuan karena kebencian merupakan contoh dari kasus dimana perempuan selalu menjadi korban. Ternyata hal ini dipengaruhi oleh adanya nilai-nilai patriarki yang dianut di masyarakat yang melihat tatanan sosial dipengaruhi oleh eksistensi laki-laki yang selalu dianggap sebagai pemimpin.

Berangkat dari budaya patriarki yang memprioritaskan peran laki-laki, masyarakat melihat perempuan bukan lagi perhatian di ranah publik, perempuan hanya berkutik di ranah domestik maupun rumah tangga. Secara konstruktif, hal ini menimbulkan adanya relasi kuasa yang timpang dimana laki-laki merasa mendominasi dan berhak melakukan tindakan yang merendahkan perempuan. Maka dari itu, kriminalitas terhadap perempuan sering ditemui terutama di negara berkembang.

India sebagai salah satu negara berkembang yang berada di belahan Asia Selatan menjadi negara yang acap kali diisukan oleh dunia tentang minimnya pemberdayaan terhadap perempuan. Ditambah lagi budaya patriarki yang masih kental diamini oleh masyarakat membuat sepak terjang perempuan di India semakin tidak terlihat. Hingga akhirnya muncullah tuntutan dari pihak ketiga yang memiliki fokus pada isu pemberdayaan perempuan yang mendorong pemerintah India untuk turun tangan dalam mengkonstruksikan upaya-upaya negara dalam memberdayakan perempuan.

Pihak ketiga yang dimaksud di atas adalah UN Women dalam Konvensi CEDAW pada 2015 yang menyatakan India perlu melakukan gebrakan dengan kredibilitas tinggi untuk memberdayakan perempuan dari tiga poin utama yakni ekonomi, politik, dan sosial dengan melakukan administrasi pemerintahan yang akuntabel dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan tuntutan yang muncul, demi mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemerintah India di masa Narendra Modi periode pertama mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP). Diratifikasi pada tahun 2015, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dinilai sebagai kebijakan yang holistik. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang bersifat multi sektor yang mencakup dinamika kehidupan perempuan di India.

Kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) memberikan skema inklusif yang bertujuan untuk memberdayakan peran perempuan mulai dari ranah domestik hingga ranah publik. Secara komprehensif, kebijakan ini mengatur sektor pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan kemampuan

demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economically productive*), memberikan pengarahannya pada partisipasi perempuan di ranah publik, jaminan terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik, serta budaya pengarusutamaan perempuan dalam sektor-sektor lainnya.

Narendra Modi kemudian menggunakan kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) untuk menjawab tuntutan yang diberikan dari UN Women dalam mengoptimalkan pemberdayaan perempuan. Maka dari itu, kebijakan ini pada akhirnya mencakup banyak aspek yang memberikan ruang terbuka bagi perempuan untuk mengedepankan potensinya dalam memberdayakan dirinya sendiri. Perempuan diberikan kekuatan dan jaminan dari negara untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi (*self-sufficiency*).

Dapat disimpulkan bahwa ketika hak-hak dasar perempuan terpenuhi dan negara memberikan fasilitas yang memadai dalam memberdayakan perempuan maka dampak jangka panjang yang dihasilkan adalah kemajuan negara itu sendiri. Ditambah lagi, jaminan yang setimpal pada pola kehidupan yang melibatkan peran gender di dalamnya, akan semakin mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam dua tahun periode pertama Narendra Modi terhitung tahun 2015-2017, melalui kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) Narendra Modi telah mengupayakan peran perempuan yang semestinya untuk mewujudkan pembangunan yang holistik demi terciptanya India sebagai negara yang ramah gender di masa yang akan datang.

## 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, penulis memiliki rekomendasi yang dapat menjadi bahan penelitian lanjutan untuk membahas lebih dalam terkait dimensi yang tidak termaktub dalam penelitian ini. Mengingat kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) merupakan kebijakan yang baru diinisiasi pada tahun 2015, penulis melihat masih sedikit tulisan yang membahas mengenai kebijakan ini yang dilihat dari perspektif pengaruh pemimpin negara pada pola hidup masyarakat yang holistik dan implikasinya pada pembangunan negara yang dianalisis dengan variabel aktor rasional (*rational actor*). Hal ini menjadi perhatian penulis karena kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) yang dinilai sebagai kebijakan pembangunan holistik ini baru terbentuk ketika Narendra Modi menjabat di periode pertamanya. Ini berarti sebuah kebijakan yang ada di sebuah negara sangat ditentukan oleh bagaimana pemimpin negaranya dalam menyelesaikan sebuah problematika dengan pertimbangan *costs and benefits*.

Dalam konteks India sebagai negara berkembang, maka peran pemimpin menjadi aspek terpenting dalam menjustifikasi pembentukan kebijakan-kebijakan yang rasional. Maka analisis menggunakan pendekatan konstruksi aktor rasional menarik perhatian untuk melihat sejarah Narendra Modi sebagai perdana menteri yang telah terjun ke dunia politik sejak lama dalam mencetuskan kebijakan pemberdayaan perempuan. Meskipun pada akhirnya kebijakan ini dibuat untuk mengejawantahkan tuntutan dari UN

Women, tetapi apabila pemimpin negara tidak memiliki rasionalisasi yang matang, maka kebijakan pembangunan holistik tidak akan menjadi opsi bagi India.

Dengan menggali lebih dalam perihal keputusan yang dibuat oleh Narendra Modi, secara langsung dapat mengindikasikan mengapa India siap menjadi negara yang berkontribusi pada pembangunan holistik yang mengarusutamakan peran perempuan, padahal India dikenal sebagai negara yang lekat dengan budaya patriarki. Di sisi lain, penelitian yang berbasis pada pendekatan aktor rasional mampu memberikan gambaran tindakan pemimpin negara dalam memaksimalkan kalkulasi untung rugi India di bawah kepemimpinannya. Secara rinci, pendekatan aktor rasional mampu mengupastuntas strategi pemimpin negara dalam mencapai agenda politiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Ajizah, Nur, and Khomisah. 2021. "Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender." *Journal of Gender and Family Studies*, (December), 59-73. 10.15575/azzahra.v2i1.11908.
- Alam, Shah. 2015. "Participation of Women in Indian Politics and The Role of Media." *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences* 4, no. 1 (January): 77-83.
- Bharti. 2019. "Digital India: Challenges And Opportunities." *European Journal of Business & Social Sciences* 7, no. 5 (May): 2866-2872.
- Chandiok, Sunita, and Dwarka BCIPS. 2016. "India The World's Fastest Growing Startup Ecosystem: A Study." *mity Research Journal of Tourism, Aviation and Hospitality* 1, no. 2 (July): 84-93.
- Cortis, Rachelle, and Vincent Cassar. 2005. "Perceptions of and About Women as Managers: Investigating job involvement, Self-esteem and Attitudes." *Women in Management Review* 20 (3): 149-164. DOI 10.1108/09649420510591834.
- Dandekar, Hemalata. 1986. "Indian Women's Development: Four Lenses." *South Asia Bulletin* 6 1:25.
- Dash, Chandra, and Shilpa Dash. 2020. "Skill Development Mission and the Skill Landscape of India: An Empirical Study." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 5, no. 10 (October): 604-619.
- Devi, Kalpana. 2019. "Theory and Practice of Women Empowerment in India." *Int'l JL Mgmt. & Human* 2:30.
- Dhamija, Somesh, Aruna Dhamija, and Amit Kumar. 2016. "A Critical Analysis on Women Participation in Modern-Day Indian Politics." *Pune Research Journal* 12:1-8.
- Equbal, Naiyar. 2019. "Feminist Politics in India: Women, Identity and Political Activism." *International Journal of Political Science and Governance* 1 (2): 63-67.
- Ghosh, Madhusudan. 2018. "Gender Equality, Growth and Human Development in India." *Asian Development Perspectives* 9 (1): 68-87.
- Goyal, Shikha. 2022. "Narendra Modi Biography: Early Life, Family, Political Life, Net Worth & Key Facts." Jagran Josh. <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/narendra-modi-biography-1554300449-1>.
- Himani, Bannerji. 2016. "Patriarchy in The Era of Neoliberalism: The Case of India." *Social Scientist* 44:3-27.

- Israpil. 2017. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)." *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 5 (2). 10.31969/pusaka.v5i2.176.
- Kumar, Gaurav. 2023. "Catalyzing Gender Equality: A Comprehensive Evaluation of the Beti Bachao, Beti Padhao Policy in India." *Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 6, no. 11 (November): 19-24. 10.2018/SS/202311004.
- Kumar, Mahendra, Khina Sharma, and Anita Kumari. 2022. "The Women Empowerment in India and Nursing Profession as an Emerging Identity of Women's Era." *Journal of Women Empowerment and Studies (JWES)* 4:35-39. ISSN: 2799-1253.
- Kurniaty, Evi Y. 2015. "Affirmative Action: Reservation Seats untuk Perempuan di Parlemen India." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 3 (2): 187-196.
- Mareta, Sabillina. 2017. "Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6:24-37.
- Meenakshi, and Ritu Bakshi. 2022. "Beti Bachao Beti Padhao: Laws And Acts In India Towards Girls Empowerment." *Journal of Positive School Psychology* 6 (8): 10137-10145.
- Ministry of Women & Child Development. 2023. *Beti Bachao Beti Padhao: Operational Manual*. India: n.p.
- Mishra, Anil Dutta. 2014. "Women Empowerment: Issues and Challenges." *Indian Journal of Public Administration* 3:398-406.
- Misra, Satya Narayan, and Sanjaya Ghadai. 2015. "Make in India and Challenges before Education Policy." *Journal of Education and Practice* 6 (1): 97-102.
- Mittal, Ashish. 2021. "Impact of Education on Women Empowerment in India." *VEETHIKA-An International Interdisciplinary Research Journal* 7, no. 3 (September): 9-14. <https://doi.org/10.48001/veethika.2021.07.03.002>.
- Motkuri, Venkatanarayana, and Suresh Naik. 2016. "Growth and Structure of Workforce in India: An Analysis of Census Data." *The Indian Economic Journal* 64 (1&2): 1-20.
- Naik, Zakir. 2017. "Empowerment of Women Through Political Participation in India." *International Journal of Academic Research and Development* 2 (6): 728-731.
- Novela, Dinita. 2023. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di India: Studi Kasus Mayawati Kunari dan Perjuangannya Melawan Diskriminasi Politik Terhadap Perempuan Dalit." *JIST Publikasi Indonesia* 4 (7): 818-831. 10.59141/jist.v4i7.651.

- Parmar, Shiva, and Amit Sharma. 2020. "Beti Bachao Beti Padhao Campaign: An Attempt to Social Empowerment." *Journal of Critical Reviews* 7 (13): 1242-1248.
- Pareek, Shatrughan. "Knowledge and Attitude Regarding "Beti Bachao, Beti Padhao Yojana" among Young and Aged Rural Adults: A Cross-Sectional Study." *n Journal of Datta Meghe Institute of Medical Sciences University*, 2022: 350-353.
- Prasetyo, Daniel, and Masduki Asbari. 2023. "Fixed Mindset versus Growth Mindset: Model Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1 (11): 215-221.
- Rawat, Preeti. 2014. "Patriarchal Beliefs, Women's Empowerment, and General Well-being." *Vikalpa: The Journal for Decision Makers* 39 (2): 43-55. 10.1177/0256090920140206.
- Reeta, Devi, Sangeeta Gupta, and Mithilesh Verma. "Awareness of women regarding Beti Bachao and Beti." *International Journal of Home Science*, 2021: 181-183.
- Saini, Varsha. 2018. "Awareness on Gender Empowerment and Beti Bachao Beti Padhao Through Intervention." *Impact Journal* 6 (1): 227-234.
- Saputra, Alrafsya. 2018. "Dilema dalam Kebijakan Negara dan Keamanan Manusia: Kasus Kebijakan India pada Pemerintahan Narendra Modi, Perdana Menteri India." *Sentris* 1 (Human Security): 15-24. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4143.15-24>.
- Sarkar, Sudipa, Soham Sahoo, and Stephan Klasen. 2019. "Employment Transitions of Women in India: A Panel Analysis." *World Development* 115:291-309. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.12.003>.
- Sharma, B. R., and Gupta Manisha. 2004. "Gender Based Violence in India: A Never-Ending Phenomenon." *Journal of International Women's Studies* 1:114-123.
- Sharma, Eliza. 2020. "Women and Politics: A Case Study of Political Empowerment of Indian Women." *International Journal of Sociology and Social Policy* 40:607-626. DOI 10.1108/IJSSP-12-2019-026.
- Sharma, Gitashree, and Kabyashree Borgohain. 2022. "Beti Bachao Beti Parhao: An Indian Government Initiative to Promote Gender Equality." *Journal of Positive School Psychology* 6 (4): 5142-5145.
- Sharma, M. 2016. "Narendra Modi and The New Education Policy: Retrospection, Reform and Reality." *Journal of Asian Public Policy* 2:140-153.

- Spencer-Oatey, Helen. 2012. *What Is Culture? A Compilation of Quotations*.
- Tedjo, Ramadhan, Daffa, Dirgantara, and Bahari. 2021. "Tantangan Budaya Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di India Dan Solusinya." *Jurnal Hubungan Internasional*, 142-157.
- Varma, Rashmi. 2017. "(Un) Modifying India: Nationalism, Sexual Violence and The Politics of Hindutva." *Feminist Dissent* 2:57-82.
- Wahyudi, Very. 2018. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1 (1): 63-83.

### **Buku**

- Biswasa, and Sinhab. *Implication of 'Beti Bachao Beti Padhao' Scheme on Girl Child in India: A Critical Analysis*. New Delhi: Bloomsbury Publishing India, 2020.
- Chandra. 2016. *Empowering Women through Political Participation in India*. N.p.: Regal Publishers.
- Gautam, Barthendu, and Vikas Sharma. 2023. *Women Empowerment : Various Dimensions*. N.p.: Raj Publishing House.
- Sengupta, Bhattacharya, and Arora. 2019. *Women Empowerment and Development: Issues and Challenges*. Australia: Central West Publishing.

### **Laporan**

- Manor, James. 2003. *Democratisation with Inclusion: Political Reforms and People's Empowerment at the Grassroots*. N.p.: Human Development Report Office.
- McKinsey&Company. *The Power of Parity: Advancing Women's Equality in India*. McKinsey&Company, 2015.
- Schwab, Klaus. *The Global Competitiveness Report 2016–2017*. Geneva: World Economic Forum, 2016.

### **Artikel Daring**

- Council of Foreign Relations. *Spotlight on India, Growing Economies Through Gender Parity*. 2016. <https://www.cfr.org/womens-participation-in-global-economy/case-studies/india/> (accessed May 18, 2024).
- Economic Times. 2020. "FDI in India rises to \$284 billion during 2014-19: FM Nirmala Sitharaman." *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/fdi-in-india-rises-to-284-billion-during-2014-19-fm-nirmala-sitharaman/articleshow/73832292.cms>.
- Ellis, Hannah. 2021. "India has more women than men for first time, survey finds." *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2021/nov/25/india-has-more-women-than-men-for-first-time-survey-finds>.

- France24. *France24*. May 26, 2019. <https://www.france24.com/en/20190526-five-economic-challenges-indias-modi> (accessed May 16, 2024).
- Gange, Namani. *NarendraModi.id*. January 22, 2015. <https://www.narendramodi.in/pms-remarks-at-the-launch-of-beti-bachao-beti-padhao-programme-7179> (accessed May 17, 2024).
- Khana, Smrindhi. *Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation*. April 15, 2017. <https://spmrf.org/beti-bachao-beti-padhao-bbbp-prime-minister-narendra-modis-fight-gender-imbalance/> (accessed May 16, 2024).
- NDTV. 2020. “Holistic Development Not Possible Without Gender Justice: PM Modi.” <https://www.ndtv.com/india-news/pm-narendra-modi-says-holistic-development-not-possible-without-gender-justice-2184139>.
- Rathore, Manya. 2023. “India: Crime Rate Against Women.” Statista. <https://www.statista.com/statistics/1155088/india-crime-rate-against-women/>.
- Ray, Aparajita. *India News*. November 12, 2015. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-ranks-127th-on-gender-inequality-index-out-of-142-countries-report/articleshow/49758677.cms> (accessed May 17, 2024).
- The Economic Times. *New*. August 8, 2023. <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/beti-bachao-beti-padhaos-brand-ambassador-and-wrestler-rani-rana-accuses-in-laws-of-dowry-harassment-and-physical-abuse/articleshow/102525702.cms?from=mdr> (accessed May 18, 2024).
- World Economic Forum. *India's growth is Outpacing China's. Here's How They Did It*. September 28, 2016. <https://www.weforum.org/agenda/2016/09/indias-growth-is-outpacing-chinas-heres-how-they-did-it/> (accessed May 18, 2024).
- World Economic Forum. *Trade and Investment*. March 9, 2017. <https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/> (accessed May 18, 2024).